

KONFLIK SAMPANG: SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI-KOMUNIKASI

Handrini Ardiyanti*

Abstract

Social conflicts in Sampang, Madura, have often occurred between two different groups of Muslim, namely the Sunni and Shiite, who lives in the same region. This essay discusses the background of the social conflict and attempts to propose alternative conflict resolution. The writer argues the need to adopt a combination of sociology and communication approaches which tries to examine deeply the interaction between the two different Islam sects. Through such combination of approach, it is hoped therefore that the cases of the horizontal conflicts can be clearly explained and properly handled.

Keywords: Sociological Communication, Sampang, Madura, Sectarian conflicts, Religious Conflicts, Islam Sects.

Abstrak

Konflik Sampang Madura pada dasarnya terjadi antara dua kelompok yaitu kelompok sunni dengan kelompok syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah yang sama. Karena itu tulisan ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.

Kata kunci: Sosiologi Komunikasi, Sampang, Madura, Konflik Sektarian, Konflik Agama, Sekte Islam.

* Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: handrini@gmail.com.

I. Pendahuluan

Konflik sosial selalu mengandung kompleksitas permasalahan. Karena itu berbagai pendekatan dapat digunakan untuk menelaah konflik sosial guna mendapatkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menelaah konflik sosial adalah pendekatan sosiologi komunikasi.

Pendekatan sosiologi komunikasi relevan digunakan untuk menelaah kasus Sampang karena dalam pendekatan sosiologi komunikasi dipelajari tentang proses interaksi orang-orang dalam masyarakat termasuk konten interaksi atau komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi serta semua konsekuensi yang terjadi dari seluruh proses komunikasi tersebut.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok maupun antarkelompok.¹

Konflik yang terjadi di Sampang, Madura pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok yaitu sunni dengan syiah yang diawali dengan adanya ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda.² Kelompok sunni tidak percaya terhadap kelompok syiah karena menyakini bahwa syiah adalah ajaran sesat sebagaimana Ahmadiyah maupun kelompok Eden.

Karena itu dengan menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.

A. Perumusan Masalah

Konflik sampang, Madura pada dasarnya adalah konflik antara dua kelompok antara kelompok sunni dengan kelompok Syiah. Salah satu faktor utama pencetus terjadinya penyerangan terhadap kelompok Syiah oleh kelompok Sunni adalah karena adanya keyakinan dari kelompok Sunni bahwa kelompok Syiah adalah kelompok sesat. Bagaimana alternatif kebijakan dalam mengatasi konflik antara dua kelompok dari agama yang

¹ Soeryono Soekonto dalam Burhan Bungin, "Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta : Prenada Media Group, Oktober 2009 hal 31.

² Eko Harry Susanto. Komunikasi dan Konflik Antar Kelompok, Bisnis Indonesia, 3 Desember 2012.

sama dalam melakukan interaksi sosial dapat didalami dengan menggunakan studi pendekatan sosiologi komunikasi .

B. Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki tujuan yaitu mengetahui tinjauan konflik sunni-syiah dari berbagai teori yang ada dalam bidang studi pendekatan sosiologi komunikasi guna mengetahui alternatif pemecahannya.

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu pendekatan dalam sosiologi komunikasi yang dapat digunakan untuk mengagas alternatif kebijakan dalam mengatasi konflik adalah pandangan yang dikemukakan Gilin dan Gillin sebagaimana dikutip dalam Burhan Bungin tentang proses *accommodation* yang merupakan salah satu dari proses interaksi sosial. *Accomodation* adalah proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang dalam interaksi sosial antara individu dan antar kelompok di dalam masyarakat terutama yang ada hubungannya dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

Proses akomodasi merupakan proses untuk meredakan suatu pertentangan yang terjadi di masyarakat, baik itu pertentangan yang terjadi di antara individu, antar kelompok dan masyarakat. Proses akomodasi ini menuju pada suatu tujuan yang mencapai kestabilan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah :

1. *Coercion* (pemaksaan) yaitu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan atau kekerasan secara fisik atau psikologis.
2. *Compromise* (kompromi) yaitu akomodasi yang dicapai karena masing-masing pihak yang terlibat dalam proses ini saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian oleh pihak ketiga atau badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang bertentangan.
3. *Mediation* merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan melalui penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral.
4. *Conciliation* (konsiliasi) yaitu bentuk akomodasi yang terjadi melalui usaha untuk mempertemukan keinginan – keinginan dari pihak yang berselisih.
5. *Toleration* adalah akomodasi tidak formal karena akomodasi dalam bentuk itu dilakukan dengan cara masing-masing pihak menghindari diri dari pertikaian.
6. *Stalemate* merupakan pencapaian akomodasi dimana pihak-pihak yang bertikai mempunyai kekuatan yang sama untuk berhenti pada satu titik tertentu dan mereka menahan diri.

7. *Adjudication* adalah bentuk akomodasi yang dilakukan mengalami jalan buntu sehingga penyelesaiannya menggunakan jalan pengadilan.³

Konsep lain yang digunakan sebagai pisau analitik dalam tulisan ini adalah konsep tentang stereotip. Stereotip menurut Samovar (1981) dalam Rahardjo stereotip adalah prasangka yang akan mempengaruhi jalannya komunikasi, antara lain menjadi penyebab tidak berlangsungnya komunikasi karena antara kedua belah pihak yang berkonflik melakukan penghindaran komunikasi atau *communication avoidance*. Bahkan bila stereotip dan prasangka berlangsung sangat intensif, maka orang atau kelompok yang berprasangka akan terlibat hal-hal yang bersifat deskriminatif terhadap kelompok yang tidak disukai sehingga sangat mudah sekali mengarah pada konfrontasi dan konflik terbuka.⁴

Konsep lain yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep konversi. Konversi sebagaimana diungkap James (2004: 208) dalam Atwar Bajari & Sahala Tua Saragih adalah terlahir kembali (*regenerated*), menerima rahmat, mendapatkan pengalaman religious, memperoleh kepastian sebagai akibat menguatnya keyakinan terhadap realitas keagamaan.

Pelaku konversi lazimnya mengalami perubahan konsep diri karena kesadaran serta motif yang ada pada dirinya mengalami perubahan. Konsep diri juga muncul karena adanya komunikasi yang terjadi antara individu dalam masyarakat. Keberhasilan proses keberhasilan tersebut menuntut adanya *significant others* dan *reference groups* baru yang mempunyai nilai-nilai yang sama dan mengarahkan para pelakunya kepada realitas baru. Mengingat hal tersebut merupakan tindak komunikasi karenanya sangat erat berkaitan dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Pertukaran makna (intersubjektivitas) merupakan unsur kunci berlangsungnya konversi sehingga menimbulkan transformasi identitas. Transformasi identitas meliputi perubahan psikologis dan sosiologis dalam hal kesadaran beragama karena individu berubah dari sebelumnya.⁵

II. Pembahasan

Pembahasan konflik Sampang, Madura dalam telaah sosiologi komunikasi akan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu: *pertama*, menguraikan latar belakang konflik. *Kedua*, memaparkan konflik Sampang dari telaah sosiologi komunikasi.

³ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Tehnologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hal 60-61.

⁴ Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural : Midfulness Dalam Komunikasi Antar Etnis*, Jakarta: Kencana Prenanis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal 62.

⁵ Atwar Bajari & Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Konstektual, Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Bandung : Rosda Karya, 2011, hal 216-218.

Latar Belakang Konflik

Konflik yang meletus pada 26 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB diawali dengan penyerbuan warga syiah di Sampang oleh kurang lebih 200 orang warga yang mengakibatkan dua orang tewas dan 15 rumah hangus terbakar.⁶

Penyerangan itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Kompleks Pesantren Islam Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, itu pernah diserbu pada 2004, 2006, dan Desember 2011.⁷

Bahkan para aktor dari konflik tersebut telah dikenakan sanksi hukum. Terhadap peristiwa yang terjadi pada 29 Desember 2011. Dari peristiwa tersebut, polisi menetapkan Tajul Muluk sebagai tersangka atas laporan Rois Al-Hukuma pada 6 Maret 2012. Polisi menjerat Tajul Muluk dengan Pasal Penistaan dan Penodaan Agama. Ia divonis dua tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Bukan hanya Tajul, terdakwa tunggal pembakaran Kompleks Pesantren Syiah, Muskirah, juga divonis 3 bulan 10 hari pada 10 April 2012.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Hadiatmoko sempat mengeluarkan pernyataan yang meminta agar semua pihak tidak lagi menyebut konflik di Sampang, Madura, Jawa Timur, berlatarbelakang perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah melainkan hanya karena persoalan asmara. Menurutnya konflik berdarah yang disertai pembakaran puluhan rumah tersebut semata-mata karena berawal dari konflik dua orang anak pasangan Choirul Ummah-Ma'mun Achmad, yakni Tajul Muluk dan Rois Al Hukuma tahun 2005. Awalnya, kakak beradik itu sama-sama penganut Syiah. Ketika itu, Rois ingin menikahi salah satu santrinya yang bernama Halimah. Namun, Halimah justru menikah dengan tetangga Muluk.⁸

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari terjadinya konflik di Sampang tidaklah sesederhana itu. Salah satu faktor pencetus terbesar adalah kebencian yang disebarkan dengan mengatakan syi'ah sebagai kelompok sesat.⁹

Jauh sebelum pecahnya konflik 26 Agustus 2012, pada tahun 2006, lima puluh ulama se-Madura diantaranya KH Ahmad Nawawi, (Karang Gayam

⁶ Polri Harapkan Bisa Atasi Trauma Kekerasan di Sampang, <http://www.tribunnews.com/2012/08/30/polri-harapkan-bisa-atasi-trauma-kekerasan-di-sampang> diakses Kamis, 6 September 2012 pukul 09.00 wib.

⁷ Cornila Desyana, "Terus Diancam, Syiah Madura Tak akan Diam Terus" <http://www.tempo.co/edsus/konten-berita/kesra/2012/09/02/427020/Terus-Diancam-Syiah-Madura-Tak-akan-Diam-Terus> diakses Senin, 3 September 2012 pukul 17.45 wib.

⁸ "Polri: Konflik Sampang karena Asmara" <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/14244721/Polri.Konflik.Sampang.karena.Asmara> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 18.00 wib.

⁹ Ahmad Zainul Hamdi, "Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Sui'I Sampang Madura, Islamica, Vol.6, No.2, Maret 2012, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2012 hal 215.

Omben, Sampang), KH. Barizi Muhammad, (Sampang), KH. Ghazali Muhammad (Sampang), KH. Lutfillah Moh. Ridhwan (Sampang), KH. Yahya Hamiduddin (Sampang) dan ulama lainnya telah menyampaikan pernyataan sikap yang menghimbau kepada Pemerintah agar melarang aliran tersebut serta menghapus hingga ke akar-akarnya.¹⁰

Jauh sebelum pecahnya konflik 26 Agustus 2012, pada tahun 2006, lima puluh ulama se-Madura diantaranya KH Ahmad Nawawi, (Karang Gayam Omben, Sampang), KH. Barizi Muhammad, (Sampang), KH. Ghazali Muhammad (Sampang), KH. Lutfillah Moh. Ridhwan (Sampang), KH. Yahya Hamiduddin (Sampang) dan ulama lainnya telah menyampaikan pernyataan sikap yang menghimbau kepada Pemerintah agar melarang aliran tersebut serta menghapus hingga ke akar-akarnya.¹¹

Tak hanya itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa konflik ini juga tidak dapat terlepas dari konflik Sunni–Syiah dalam dunia internasional. Syiah merupakan kelompok minoritas karena diperkirakan jumlah Syiah di dunia hanya mencapai 10 – 15 % dari keseluruhan jumlah umat muslim di dunia.

Bahkan Wakil Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi NU) Agus Sunyoto menenggarai konflik Syiah di tanah air ini berhubungan dengan dengan pertemuan KTT Non Blok di Iran. Menurutnya, konflik utamanya berkaitan dengan kepentingan Amerika yang berharap sekretaris jenderal PBB tak menghadiri pertemuan KTT Non Blok di Iran.¹²

Menurut Mike Shuster, konflik Sunni-Syiah dimulai sejak ribuan tahun pada saat kepemimpinan Khilafah Ali bin Abi Thalib. Salah satu perbedaan pandangan adalah menurut Islam Sunni, ia adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syi'ah berpendapat bahwa ia adalah Imam sekaligus Khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Syi'ah berpendapat bahwa Ali adalah khalifah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad, dan sudah ditunjuk oleh Beliau atas perintah Allah di Ghadir Khum. Syi'ah meninggikan kedudukan Ali atas Sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Syi'ah selalu menambahkan nama Ali bin Abi Thalib dengan *Alayhi Salam* (AS) atau semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan. Sunni menambahkan nama Ali dengan *Radhiyallahu Anhu* (RA) atau semoga Allah melimpahkan Ridha

¹⁰ "50 Ulama Telah Peringatkan Ajaran Tajul Muluk" dalam <http://www.hidayatullah.com/read/20494/03/01/2012/undefined> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 17.40 wib.

¹¹ "50 Ulama Telah Peringatkan Ajaran Tajul Muluk" dalam <http://www.hidayatullah.com/read/20494/03/01/2012/undefined> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 17.40 wib.

¹² "Kapolri: Paling Gampang, Relokasi Syiah dari Sampang" *Kompas*, Senin, 3 September 2012 | 17:16 WIB diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 13.15 wib.

(ke-suka-an)nya. Tambahan ini sama sebagaimana yang juga diberikan kepada Sahabat Nabi yang lain¹³.

Perkembangan pengikut syiah di pulau Madura merupakan fenomena tersendiri sebab mayoritas masyarakat Madura yang berjumlah 3,62 juta jiwa berdasarkan data BPS 2010 hampir seluruhnya adalah mayoritas Islam Sunni yang fanatik. Menurut penuturan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Jawa Timur, Andy Irfan kepada Tempo, berawal dari ketertarikan Kiai Makmun, seorang ulama yang awalnya menganut aliran sunni di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, mendapat kabar dari sahabatnya di Iran tentang keberhasilan Ayatollah Ali Khomeini menumbangkan Syah Iran Reza Pahlevi. Karena mayoritas ulama dan kaum muslim di wilayah Madura adalah pengikut Islam Sunni yang fanatik, Makmun mempelajari Syiah secara diam-diam dengan membaca buku-buku yang dikirim sahabatnya dari Iran. Ketertarikannya ini membuat Makmun mengirim tiga anak laki-lakinya, yaitu Iklil al Milal yang saat ini berusia 42 tahun; Tajul Muluk (40); Roisul Hukama (36); dan putrinya, Ummi Hani (32) ke Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan. YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada mazhab Syiah. Selepas lulus SMP YAPI, Tajul Muluk melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi. Tahun 1999 Tajul Muluk pulang dari Arab dan kembali menetap di Karang Gayam, Sampang. Tahun 2004 sejumlah warga desa yang juga murid Kiai Makmun mewakafkan sebidang tanah untuk mengembangkan pesantren beraliran Syiah. Pesantren kecil ini diberi nama Misbahul Huda. Pada tahun 2004 inilah mulai terjadi pertentangan terhadap penyebaran aliran syiah di pulau Madura¹⁴.

Melihat dari latar belakang terjadinya konflik Sampang dapat diketahui bahwa konflik tersebut justru berawal dari level pimpinan yaitu merupakan konflik perebutan basis otoritas kepemimpinan agama. Para kyai Sunni/NU adalah kelompok superordinat yang selama ini menikmati posisinya sebagai pemimpin agama karena diakuinya nilai-nilai ke-sunni-an/ke-NU-an sebagai nilai-nilai keagamaan bersama yang absah.

Berbagai pendapat yang disebar dengan mengatakan syi'ah sebagai kelompok sesat adalah upaya mendelimitasi syi'ah telah menimbulkan stereotip yang begitu kuat dalam masyarakat. Kelompok Tajul Muluk menjadi kelompok yang tidak disukai sehingga berujung pada menajamnya konfrontasi yang berakhir

¹³ Mike Shuster, Chronology: A History of the Shia-Sunni Split, <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7280905&ps=rs> di akses Selasa, 4 September 2012 pukul 14.30 wib.

¹⁴ "Bagaimana Kronologi Syiah Masuk Sampang?", <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/173426989/Bagaimana-Kronologi-Syiah-Masuk-Sampang> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 17.30 wib.

pada konflik terbuka dari tahun ke tahun diantaranya pada Desember 2010 beberapa warga melaporkan aktivitas ustad Tajul Muluk dan jamaah syiahnya ke MUI. Para warga melaporkan ustad Tajul Muluk dengan komunitas syiahnya karena dianggap telah meresahkan masyarakat, yang diikuti dengan peristiwa pembubaran perayaan Maulid Nabi pada 4 April 2011 hingga konflik terbuka yang terjadi terakhir pada 26 Agustus 2012 berupa pembakaran 37 rumah warga penganut kelompok syiah.

Tahapan proses masuknya syiah di Indonesia sebagaimana *dynamic theory of ethno religious conflict* yang diungkap Jonathan Fox, agama dalam konflik ini telah menyediakan suatu sistem kepercayaan yang bernilai dan memberikan pijakan tentang standar dan kriteria perilaku yang mendasarkan diri pada sistem tersebut, dalam komunitas syiah diantaranya sebagaimana diungkap Raphael (1984) dalam Ahmad Zainul Hamdi adalah berbagai ritual keagamaan seperti barzanji, shalawatan serta suroan.

Kelompok syiah di Indonesia mengorganisasikan ketaatan melalui intitusi sekaligus melegitimasi aktor, aksi dan lembaga dengan mendirikan IJABI (Ikatan Jamaa'ah Ahlul Bait Indonesia). Sebagaimana diungkapkan Wakhid Sugiyarto (2009) dalam Ahmad Zainul Hamdi (2012) IJABI didirikan oleh Jalaluddin Rahmat pada tahun 2006. Institusionalisasi syiah dalam wajah modern seperti IJABI ini adalah hasil masuknya syiah gelombang kedua yang terjadi pada tahun 1980-an beriringan dengan keberhasilan revolusi Islam di Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini yang memiliki dua arus yaitu akademis dan politis.¹⁵

Transformasi identitas meliputi perubahan psikologis dan sosiologis dalam hal kesadaran beragama yang terjadi pada komunitas syiah di Sampang, Madura terjadi dalam serangkaian proses konversi. Konversi sebagaimana diungkap James (2004: 208) dalam Atwar Bajari & Sahala Tua Saragih dimana pelaku konversi dalam kasus ini adalah Ustad Tajul Muluk mengalami perubahan konsep diri karena kesadaran serta motif yang ada pada dirinya mengalami perubahan.

Konsep diri Ustad Tajul Muluk sebagai seorang penganut syiah muncul karena adanya *significant others* dan *reference groups* baru yang mempunyai nilai-nilai yang sama dan mengarahkan para pelakunya kepada realitas syiah yaitu berawal dari ayahnya sendiri Kiai Makmun hingga Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan. YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada mazhab Syiah dan Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi. Pertukaran makna (intersubjektivitas) terjadi begitu baik karena

¹⁵ Ahmad Zainul Hamdi, "Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Sui'I Sampang Madura, Islamica, Vol.6, No.2, Maret 2012, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2012, hal.215-216.

kontinuitas belajar Ustad Tajul Muluk mulai dari ayahnya sendiri hingga dalam proses belajar baik itu di Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan hingga Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi. sehingga menimbulkan transformasi identitas Ustad Tajul Muluk sebagai penganut Syiah yang kuat.

Konflik Sampang dari Telaah Sosiologi Komunikasi

Mengagas berbagai alternative dalam konflik Sunni-syiah di Sampang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dalam sosiologi komunikasi tentang proses *accommodation* yang tak hanya dilaksanakan dibawah kendali pemerintah dan aparat keamanan daerah melainkan langsung dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab konflik di Sampang bukanlah konflik yang bersifat lokalitas melainkan konflik yang terkait dengan pemahaman konsep dalam beragama yang berbeda. Konflik Sampang bisa terjadi di daerah lainnya mengingat penyebaran ajaran syiah telah terjadi di seluruh penjuru Indonesia.

Permasalahannya kemudian adalah benar atau tidakkah tuduhan kelompok Sunni yang merupakan komunitas mayor di Indonesia bahwa Syiah adalah ajaran sesat sebagaimana Ahmadiyah maupun kelompok Eden ?¹⁶

Tentunya hal ini tidak dapat melegitimasi kelompok mayoritas untuk dapat melakukan kekerasan terhadap penganut ajaran yang bersifat minoritas. Tindakan tegas harus langsung dilakukan pemerintah pusat dalam menyikapi konflik yang berawal dari perbedaan keyakinan dalam beragaman agar jangan sampai setiap ada konflik di masyarakat dengan latar belakang perbedaan agama, keyakinan, kelompok minoritas harus terusir hanya karena perbedaan keyakinan.

Karena itu relokasi masyarakat dari kelompok syiah bukanlah sebuah alternative yang bijak dalam menghadapi konflik terbuka yang berasal dari perbedaan keyakinan dan pemahaman dalam beragama ini. Pada dasarnya negara wajib menjamin keselamatan setiap warga negara. Untuk itu kebijakan relokasi justru dapat menjadi preseden buruk bahwa konflik terbuka yang bersifat agamis dapat menyebabkan warga negara terusir dari tempat tinggal yang sah hanya karena beda keyakinan. Relokasi perlu direnungkan agar tidak dijadikan model oleh siapapun yang ingin bangsa Indonesia terpecah belah.

Meskipun di lain sisi hak sebagai kelompok minoritas yang tetap harus mendapatkan perlindungan hukum tidak pula serta merta dapat dijadikan legitimasi pembenaran terhadap sebuah keyakinan. Pemerintah pusat dalam

¹⁶ Al Makin, Persecuting, prosecuting minorities, <http://www.colorado.edu/conflict/peace/problem/mcca7535.htm> diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.00 wib.

koordinasi Departemen Agama hendaknya bersikap bijak dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan para ulama yang terpercaya serta mendasarkan diri pada acuan induk dalam beragama dalam hal ini adalah agama Islam untuk menentukan benar tidaknya tuduhan bahwa syiah merupakan ajaran sesat.

Jika pada akhirnya pembahasan yang mendalam dan komprehensif yang melibatkan berbagai institusi keagamaan yang kelebagaannya telah diakui secara konstitusional seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan sejumlah kelembagaan Islam lainnya, anggapan bahwa aliran syiah mengandung ajaran sesat dalam pandangan Islam maka pemerintah harus tegas mengambil berbagai kebijakan pelarangan sama halnya seperti yang dilakukan terhadap aliran Ahmadiyah dan Eden serta melakukan serangkaian kebijakan persuasif untuk melakukan penyadaran dan aparat keamanan di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara hendaknya berupaya untuk mengantisipasi perlawanan dari kelompok syiah mengingat jumlah penganut kelompok syiah jauh lebih besar dari penganut Ahmadiyah dan Eden serta berupaya mengantisipasi perlawanan yang dilakukan agen-agen dari kelompok syiah internasional.

Saling tuding antara sesama pemangku kebijakan di daerah sebagaimana diungkap Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, M. Nasser yang menyatakan, dalam tragedi Sampang, polisi sudah berusaha menghindarkan bentrok, namun tak ada peran serta pemerintah daerah dalam mengupayakan perdamaian yang menyebabkan konflik Sampang berulang¹⁷ hendaknya disikapi secara tegas oleh pemerintah pusat dengan mengembalikan penyelesaian permasalahan koordinasi kepada UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan menegaskan kembali tentang peran dan tanggungjawab masing-masing institusi dalam upaya melakukan tindakan pencegahan terjadinya konflik.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik antara lain dengan cara memelihara kondisi damai di masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik serta mengembangkan sistem peringatan dini.¹⁸

Kebijakan lain yang dilakukan bersamaan adalah melakukan proses akomodasi yang merupakan proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang dalam interaksi sosial antara individu dan antar kelompok di dalam masyarakat terutama yang ada hubungannya dengan

¹⁷ Kata Kompolnas Soal Konflik Syiah, Sampang, Madura , <http://www.tempo.co/edsus/konten-berita/kesra/2012/09/02/427009/Kata-Kompolnas-Soal-Konflik-Syiah-Sampang-Madura> diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.00 wib.

¹⁸ UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

norma-norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Sampang yaitu antara kelompok sunni dan syiah.

Proses akomodasi antara kedua kelompok ini bukan merupakan hal yang mudah, karenanya pemerintah pusat baik itu Departemen Agama maupun institusi keagamaan tertinggi seperti MUI Pusat dan NU Pusat maupun aparat keamanan baik itu intelejen maupun kepolisian serta pemerintah daerah harus mengawal ketat proses ini. Pada tahapan awal proses akomodasi kerap kali membutuhkan *coercion* (pemaksaan) yaitu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan atau kekerasan secara fisik atau psikologis agar kedua kelompok yang bertikai baik itu kelompok sunni maupun syiah dapat melakukan *compromise* (kompromi) yaitu akomodasi yang dicapai karena masing-masing pihak yang terlibat dalam proses ini saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian oleh pihak ketiga atau badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang bertentangan yaitu pemerintah pusat.

Hal yang dikompromikan tentunya bukan terkait dengan berbagai pemahaman dan keyakinan sesuai dengan ajaran yang dianut kedua kelompok, sebab sudah pasti masing-masing kelompok memiliki keyakinan yang kuat karena proses transformasi keyakinan yang terjadi tidak terjadi dalam sekejap mata melainkan terjadi dalam proses pembelajaran bertahun-tahun melainkan kompromi dalam kerangka menciptakan perdamaian dan kemanusiaan dengan mengembalikan pemahaman kepada konsep-konsep dasar beragama dalam acuan induk yaitu Al Quran.

Pemerintah pusat harus menjadi pihak ketiga yang netral dalam melakukan *mediation* atau mediasi yang merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan melalui penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral yang dilanjutkan dengan upaya untuk melakukan *conciliation* (konsiliasi) yaitu bentuk akomodasi yang terjadi melalui usaha untuk mempertemukan keinginan – keinginan dari pihak yang berselisih.

Pada tahapan mediasi dan konsiliasi, pemerintah hendaknya pemerintah memperhatikan setiap keinginan pihak-pihak yang berkonflik dan membahasnya dengan secara seksama dan komprehensif dengan para ulama yang terpandang baik dari kalangan kelompok Sunni maupun Syi'i.

Beberapa keinginan pihak yang bertikai misalnya seperti yang diungkapkan Ketua MUI Sampang serta salah seorang kyai NU, K.H. Bukhori Maksom sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zainul Hamdi “Secara konstitusional, paham syi’ah di Indonesia tidak dilarang, tetapi di kalangan warga NU, Syiah tidak bisa disatukan ibarat air dan minyak patut dikaji secara komprehensif.¹⁹

¹⁹ Ahmad Zainul Hamdi, *ibid*, hal.223

Berbagai langkah nyata yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat adalah mengintensifkan dialog antara kedua kelompok. Selain itu pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga penelitian di bidang sosial dan politik serta keagamaan mengembangkan kerja sama guna melakukan penelitian secara komprehensif guna memetakan wilayah potensi konflik keagamaan disertai latar belakang permasalahannya serta alternatif pemecahannya sebagai sistem pendeteksi dini.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hendaknya segera membangun sistem informasi yang dapat menyajikan data dan informasi yang akurat dan cepat tentang konflik yang terbangun dalam suatu sistem yang melembaga,

Pemerintah pusat hendaknya melakukan fasilitasi kepada setiap pemerintah daerah agar dapat memahami tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan, penanganan konflik sosial termasuk diantaranya mekanisme menyatakan suatu daerah dalam keadaan konflik serta membangun sistem mekanisme pelaporan penanganan terjadinya konflik ke dalam satu sistem yang melembaga dan integral dalam tugas dan fungsi yang melekat sesuai dengan setiap perangkat pemerintahan yang ada.

Pemerintah pusat hendaknya juga memfasilitasi serangkaian pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam hal upaya pencegahan, penanganan konflik sosial termasuk didalamnya bagaimana mekanisme pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu, cara-cara psikologis dan agamis dalam hal penanganan amuk masa, cara menanggapi trauma psikologis dari korban konflik sosial misalnya bagaimana menanggapi anak-anak Sampang yang menjadi korban penyerangan massa masih trauma serta berbagai pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam upaya penanganan konflik sosial lainnya.

Pemerintah pusat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah hendaknya juga mengupayakan terjadinya toleransi dengan cara masing-masing pihak menghindari diri dari pertikaian maupun dilakukan dengan menggunakan instrument kemasyarakatan yang ada seperti para ulama yang dipercaya yang melakukan pembahasan mendalam dengan para ulama dari kelompok-kelompok pengajian yang bertikai yang kemudian meneruskan pemahaman yang dicapai kepada jamaahnya sehingga tercipta suatu tahapan *stalemate* merupakan pencapaian akomodasi dimana pihak-pihak yang bertikai mempunyai kekuatan yang sama untuk berhenti pada satu titik tertentu dan mereka menahan diri.

Kekhasan etnis Madura yang tunduk dan taat kepada empat figur utama dalam kehidupan mereka yaitu *buppa*, *babbu*, *guru* dan *rato* (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan) hendaknya dijadikan modal utama dalam upaya penyelesaian konflik.

Kepatuhan pada figur guru yang dalam hal ini adalah kepatuhan mereka pada kyai dimana kyai di Madura dipandang sebagai elit desa sehingga posisi kyai dalam kehidupan masyarakat Madura menjadi sangat sentral perlu dijadikan landasan dalam upaya penyelesaian konflik dengan dimediasi oleh institusi keagamaan di tingkat pusat seperti MUI Pusat dan NU Pusat sebab keIslaman masyarakat Madura bisa dikatakan identik dengan NU sebab identitas ke-NU-an bagi masyarakat Madura termasuk Sampang adalah sama dengan keIslaman itu sendiri. Terlebih konflik keagamaan yang terjadi di Sampang yang melibatkan kelompok Ahlussunah pimpinan Kiai Ali Karar dan komunitas syiah di Sampang Madura berangkat dari perebutan otoritas kepemimpinan atas masyarakat yang dibalut dalam jargon-jargon keagamaan yang sarat dengan klaim kebenaran yang absolute.²⁰

Tahapan lanjut adalah proses *adjudication* yang merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan mengalami jalan buntu sehingga penyelesaiannya menggunakan jalan pengadilan. Jika pemerintah pusat melalui sebuah kajian komprehensif yang mendalam telah berhasil mencapai suatu kesimpulan benar tidaknya tuduhan bahwa ajaran syiah adalah sesat sebagaimana digaungkan kelompok sunni, maka pemerintah pusat harus mengambil tindakan tegas melalui pengadilan guna mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

Keresahan yang muncul di masyarakat terkait dengan benar tidaknya tudingan bahwa ajaran syiah sesat atau tidak jika tidak segera disikapi dengan tegas dapat menjadi bom waktu yang dapat meledakkan konflik-konflik serupa dengan konflik yang terjadi di Sampang, Madura pada daerah-daerah lainnya.

Aparat keamanan pemerintah pusat dalam koordinasi Badan Intelejen Negara dan Kepolisian hendaknya segera mempelajari proses terjadinya konflik tersebut guna mendapatkan kepastian peran dari setiap aktor yang terlibat guna memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang menjadi provokator utama hingga menyebabkan meletupnya konflik yang menimbulkan kerugian materil dan immateril sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengusutan terhadap keterlibatan Rois adik kandung dari Ustad Tajul Muluki Demikian juga dengan peran beberapa ulama sebagaimana dituduhkan Ustad Tajul Muluk yaitu Kyai Ali Karar, H. Jamal,

²⁰ Ahmad Zainul Hamdi, *ibid* hal.221

Abdul Malik, Bahram, Muklis, dan keterlibatan ormas Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) dibawah pimpinan K.H. Kholil Halim ²¹ serta peran Ustad Tajul Muluk sendiri misalnya harus dilakukan secara objektif dan intensif.

Selain itu pemerintah pusat hendaknya mengambil tindakan tegas terkait dengan pemberitaan yang bersifat provokator dalam mengupas peristiwa Sampang. Pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok yang terlibat konflik hendaknya dilakukan secara intensif guna mencegah terulangnya kembali konflik serupa.

Pemerintah pusat hendaknya juga mengkoordinasikan dilakukannya serangkaian kebijakan guna menstimuli proses terjadinya transformasi pemahaman antara dua kelompok yang bertikai secara intensif dan terus menerus sebab konflik sunni dan syiah bisa dikatakan terjadi berulang kali akibat dari rasa permusuhan dan kebencian yang disebarkan secara terus menerus secara intensif.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan terhadap kasus konflik Sampang adalah adanya ketidakpercayaan kelompok sunni terhadap kelompok syiah merupakan faktor utama penyulut terjadinya konflik. Secara konstitusional, paham syi'ah di Indonesia tidak dilarang, tetapi antara kelompok sunni dengan syiah tidak bisa disatukan dalam satu wilayah karena ibarat air dan minyak kedua kelompok itu tidak dapat berinteraksi dalam satu lingkungan sosial secara normal.

Karenaitupemerintahpusathendaknyajugamengkoordinasikandilakukannya serangkaian kebijakan guna menstimuli proses terjadinya transformasi pemahaman antara dua kelompok yang bertikai secara intensif dan terus menerus sebab konflik sunni dan syiah bisa dikatakan terjadi berulang kali akibat dari rasa permusuhan dan kebencian yang disebarkan secara terus menerus secara intensif. Jika tidak maka konflik serupa yang bermuara pada adanya keyakinan bahwa ajaran syiah sesat dapat terjadi daerah-daerah lainnya.

²¹ Ahmad Zainul Hamdi, *ibid* hal.218-220

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atwar Bajari & Sahala Tua Saragih, Komunikasi Konstektual, Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer, Bandung : Rosda Karya, 2011

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Tehnologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Turnomo Rahardjo, Menghargai Perbedaan Kultural : Midfulness Dalam Komunikasi Antar Etnis Jakarta : Kencana Prenanis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Jurnal

Jonathan Fox, "*Towards a dynamic theory of ethno religious conflict*", dalam "*Nations and Nasionalism*, ASEN, 1999

Ahmad Zainul Hamdi, "Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Sui'I Sampang Madura, *Islamica*, Vol.6, No.2, Maret 2012, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Surat Kabar

Eko Harry Susanto. Komunikasi dan Konflik Antar Kelompok, Bisnis Indonesia, 3 Desember 2012.

Internet

Cornila Desyana, "Terus Diancam, Syiah Madura Tak akan Diam Terus" <http://www.tempo.co/edsus/konten-berita/kesra/2012/09/02/427020/Terus-Diancam-Syiah-Madura-Tak-akan-Diam-Terus> diakses Senin, 3 September 2012 pukul 17.45 wib.

Polri: Konflik Sampang karena Asmara” <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/14244721/Polri.Konflik.Sampang.karena.Asmara> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 18.00 wib.

“Kapolri: Paling Gampang, Relokasi Syiah dari Sampang” Kompas, Senin, 3 September 2012 | 17:16 WIB diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 13.15 wib.

Mike Shuster, Chronology: A History of the Shia-Sunni Split, <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7280905&ps=rs> di akses Selasa, 4 September 2012 pukul 14.30 wib.

Perbedaan pandangan mengenai pribadi Ali bin Abi Thalib http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Abi_Thalib di akses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.30 wib.

Bagaimana Kronologi Syiah Masuk Sampang?”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/173426989/Bagaimana-Kronologi-Syiah-Masuk-Sampang> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 17.30 wib.

“50 Ulama Telah Peringatkan Ajaran Tajul Muluk” dalam <http://www.hidayatullah.com/read/20494/03/01/2012/undefined> diakses Rabu, 5 September 2012 pukul 17.40 wib.

Ahmad Zainul Hamdi, “Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi’i Sampang Madura” *Islamica*, Vol.6, No.2, Maret 2012.

Hasyim Muzadi: “Kunci penyelesaian Sampang di tangan ulama”, dalam <http://www.hidayatullah.com/read/24574/02/09/2012/hasyim-muzadi-> diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.05 WIB.

Al Makin, *Persecuting, prosecuting minorities*, <http://www.colorado.edu/conflict/peace/problem/mcca7535.htm> diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.00 wib.

Eko Widiyanto, “Budayawan: Konflik Syiah Terkait Politik Dunia “ dalam <http://www.tempo.co/edsus/kontenberita/kesra/2012/09/02/427014/Budayawan-Konflik-Syiah-Terkait-Politik-Dunia> diakses Senin, 3 September 2012 pukul 18.20 wib.

Kata Kompolnas Soal Konflik Syiah, Sampang, Madura, <http://www.tempo.co/edsus/konten-berita/kesra/2012/09/02/427009/Kata-Kompolnas-Soal-Konflik-Syiah-Sampang-Madura> diakses Selasa, 4 September 2012 pukul 16.00 wib.

Polri Harapkan Bisa Atasi Trauma Kekerasan di Sampang, <http://www.tribunnews.com/2012/08/30/polri-harapkan-bisa-atasi-trauma-kekerasan-di-sampang> diakses Kamis, 6 September 2012 pukul 09.00 wib.

